

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF
SULAWESI BARAT TAHUN 2014**

**REPRESENTATION OF WOMEN IN LEGISLATIVE ELECTION
IN WEST SULAWESI 2014**

¹*Citra Nayasari Fariaty,
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat
(email : citranayy@gmail.com)*

²*Andi Nur Fiqhi Utami,
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat
(email : fiqhiandi@gmail.com)*

Alamat Korespondensi:

Citra Nayasari Fariaty
Jalan Haji Andi Depu No.59,Polewali
HP : 085146218226
Email : Citranayy@gmail.com

ABSTRAK

Keterwakilan Perempuan di Sulawesi Barat masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses keterpilihan calon legislatif perempuan dan upaya calon legislatif perempuan dalam membina hubungan dengan konstituen pada pemilu legislatif di Sulawesi barat tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan calon legislatif perempuan di Sulawesi Barat pada pemilu 2014 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan peran partai politik masih kurang dalam proses kaderisasi dan memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Hambatan budaya juga menghalangi calon legislatif perempuan untuk memperoleh suara. Konsep budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat memandang perempuan sebagai makhluk lemah, lembut, dan menempatkan perempuan sebagai orang yang dipimpin. Upaya calon legislatif perempuan untuk memenangkan pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi, mengungkap isu perempuan, membangun hubungan dengan masyarakat.

Kata kunci : Keterpilihan, Partai Politik, Gender, Budaya, Konstituen.

ABSTRACT

The results showed that the election of women candidates in West Sulawesi in the 2014 election is still very low. This research aims to determine the process of the election of women candidates and women candidates in an effort to build relationships with constituents in legislative elections in western Sulawesi in 2014. This study used a qualitative method with descriptive approach to the analysis of the representation of women in legislative elections in the West Sulawesi in 2014. Data were obtained through interviews and literature. Data analyzed using data reduction, data presentation, and verification conclusion. The results showed that the election of women candidates in West Sulawesi in the 2014 election is still very low. This is due to the role of political parties is still lacking and the regeneration process and provide political education for women. Cultural barriers also hinder women candidates to gain a voice. The concept of a patriarchal culture that developed in the community to view women as being weak, soft, and put women as the people being led. The efforts of women candidates to win elections is to socialize, build relationships with the community, and work with community organizations.

Keywords : Chosenness, Political Parties, Gender, Culture, Constituents.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah proses untuk menyeleksi orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Menurut teori demokrasi klasik pemilu merupakan suatu *Transmission of Belt* sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat (Karim, 1991).

Pemilu di Indonesia memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Meskipun, kenyataannya dominasi laki-laki di parlemen lebih menonjol jika diukur dari jumlah keterwakilan namun peran perempuan tidak bisa dikesampingkan (Azhar, 2016). Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Abdullah, 2009)

Perempuan belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1955, ketika perempuan menduduki 5,9 persen kursi di parlemen. Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk pada pemilu 1977 ketika jumlah perempuan terpilih melorot dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dan kembali mengalami penurunan lagi pada pemilu 1999 menjadi 9 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebesar 10,8 persen pada tahun 1997. Meskipun demikian peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 11,8 persen pada tahun 2004, dan 18 persen pada pemilu 2009 cukup substantif. Kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan di DPR RI dari 22,6 persen pada 2004 menjadi 26,5 persen pada pemilu 2009 (UNDPIJ, 2010).

Kualitas pemilu dapat ditandai tingginya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Pateman, 2011). Kaum perempuan memiliki peran yang menentukan untuk mendongkrak angka partisipasi tersebut. Jumlah calon legislative perempuan yang meningkat untuk pemilu 2014, diyakini akan memicu partisipasi secara lebih baik. Dari data yang dihimpun Koalisi Perempuan menyebutkan, jumlah caleg perempuan DPR-RI untuk pemilu 2014 sebanyak 2.467 orang, sementara jumlah laki-lakinya sebanyak 4.152, atau total 6.619 caleg yang akan memperebutkan kursi DPR-RI.

Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, jumlah calon anggota DPR RI perempuan meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 33,6 persen menjadi 37persen pada tahun 2014. Namun, dari data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum tentang anggota legislatif terpilih, jumlah anggota DPR RI perempuan yang terpilih pada periode 2014-2019 justru mengalami penurunan. Jumlah anggota DPR RI perempuan mencapai 103 orang, atau sebesar 18 persen di tahun 2009. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 (Ramadhan, 2014).

Permasalahan mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi ditingkat nasional tapi juga tingkat lokal. Sulbar pertama kalinya mengadakan pemilu pada tahun 2009, sejak terbentuk sebagai provinsi pada tahun 2004. Pada tahun 2009 jumlah perempuan yang terpilih sangat sedikit. Jumlah ini tidak berbanding lurus dengan jumlah perempuan yang menggunakan hak pilih. Untuk calon legislatif DPR-RI yang memperebutkan 3 kursi tidak satupun caleg perempuan yang terpilih. Untuk caleg DPRD Provinsi Sulbar yang memperebutkan 40 kursi tercatat hanya 4 caleg perempuan yang terpilih. Sementara untuk pemilihan DPD-RI dari 33 caleg hanya ada 1 perempuan yang terdaftar dan lolos menjadi anggota DPD-RI.

Sulbar pada pemilu 2014 untuk DPR RI tercatat ada 13 perempuan yang mengikuti pemilu dan laki-laki sebanyak 23 orang untuk memperebutkan 3 kursi. Pemilihan ini kemudian meloloskan 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Pada pemilihan anggota DPR RI terjadi peningkatan keterwakilan perempuan, karena pada tahun 2009 kuota 3 kursi DPR RI diisi oleh laki-laki. Untuk pemilihan anggota DPD-RI dari total 25 orang caleg hanya terdaftar 3 orang caleg perempuan untuk memperebutkan 4 kursi dan tidak satupun yang lolos. Sedangkan, pada periode sebelumnya terdapat 1 orang wakil perempuan di DPD-RI. Pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulbar dari total 330 caleg, dimana ada 120 perempuan yang memperebutkan 45 kursi DPRD. Tercatat hanya ada 7 perempuan yang berhasil meraih kursi dan 38 sisanya adalah laki-laki. Meskipun ada peningkatan dari 4 orang anggota legislatif perempuan ditahun 2009 bertambah menjadi 7 orang ditahun 2014 namun jumlah tersebut belum optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai calon legislatif perempuan terpilih pada pemilu 2014 di Sulbar dan calon legislatif perempuan dalam membina hubungan dengan konstituen pada pemilu legislatif 2014 di Sulbar.

METODE PENELITIAN

Tipe dan Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014.

Sumber Data

Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Peneliti juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran, mengenai peran, fungsi, serta keterwakilan perempuan di DPRD dalam penyelenggara otonomi daerah serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan melihat keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014. Langkah yang digunakan dengan analisis data adalah sebagai berikut : reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.

HASIL

Sulbar yang terbentuk sejak tahun 2004 tercatat telah 2 kali melangsungkan pemilihan umum legislatif yaitu tahun 2009 dan 2014. Pada tahun 2014 jumlah partai yang mengikuti pemilu adalah 15 partai. Hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulbar adalah partai Demokrat memperoleh 10 kursi (22,22%) dan Golkar sebanyak 9 Kursi (20%). Gerindra di nomor urut tiga dengan perolehan 6 kursi (13,33%) dan PAN sebanyak 5 kursi (11,11%). Pemilu 2014 membuat Golkar bergeser ke peringkat 2, sedangkan pemilu tahun 2009 Golkar berada di urutan pertama.

Pergeseran Golkar pada pemilu 2014 dan munculnya partai baru yang menempati posisi 5 besar seperti Gerindra, menunjukkan bahwa mesin politik parpol bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan di Sulbar. Popularitas tokoh sering kali justru menentukan ke mana pilihan dijatuhkan. Posisi figur tidak sama di semua wilayah Sulbar. Di daerah pesisir, misalnya, dengan karakter masyarakat yang cenderung terbuka dan dinamis

membentuk dan membutuhkan figur-figur politik yang cenderung bersifat rasional dan kadang pragmatis. Mereka yang memiliki sifat kepemimpinan dan terbukti berjasa pada masyarakat potensial menjadi patron masyarakat (Surbakti, 1992). Di sisi lain, bagi masyarakat pegunungan, posisi tokoh adat dan agama sebagai patron komunitas tampak tergolong kuat.

Angka partisipasi pemilih Pileg 2014 di Sulbar mencapai 77,77 persen, angka tersebut mampu melampaui target nasional sebesar 75 persen. Meskipun melampaui target nasional namun hal ini belum maksimal karena hal ini berarti partisipasi pemilih hanya meningkat sebanyak 0.2 persen dari pemilu 2009 sebelumnya dimana partisipasi pemilih sebanyak 77,57 persen. Dalam pemilu posisi laki-laki dan perempuan seharusnya sama untuk dipilih.

Perempuan di kursi legislatif Sulbar masih sangat sedikit. Pada tahun 2009 jumlah perempuan terpilih adalah sebanyak 4 orang dari total 40 kursi DPRD Sulbar dan tahun 2014 sebanyak 7 orang dari total 45 kursi DPRD Provinsi Sulbar. Pada tabel 1 juga menunjukkan jumlah caleg perempuan terpilih yang ada di DPRD Provinsi Sulbar. Penentuan nomor urut caleg perempuan juga memberikan kesempatan yang besar bagi keterpilihan mereka. Tingkat kemiskinan di sulbar yang mencapai 19,03 persen menjadi tolak ukur untuk melihat bahwa tingkat pendidikan yang rendah di Sulbar juga masih tergolong tinggi. Tingkat pendidikan ini yang membuat pemilih-pemilih dari keluarga kurang mampu terkesan acuh. Sikap acuh ini membawa mereka untuk memilih caleg yang mereka tidak ketahui dan pilihan itu terkadang jatuh pada nomor urut satu. Mengingat nomor urut satu ada diposisi teratas sehingga mudah untuk ditemukan.

Daftar caleg DPDR Sulbar 2014 menunjukkan bahwa hanya ada 2 orang perempuan yang berada pada nomor urut 1 dan terpilih. Yang pertama di dapil Sulbar 3 dari partai Gerindra dan Sulbar 5 dari partai Demokrat. Daftar caleg perempuan yang lain berada di nomor urut 3 kebawah. Dalam penentuan nomor urut partai politik merupakan organisasi yang sangat penting. Partai politik yang menjadi satu-satunya kendaraan untuk mengikuti pemilu seharusnya melakukan proses kaderisasi dan pendidikan politik kepada perempuan. Hal ini untuk menghindari perekrutan caleg perempuan yang hanya berdasar pada ikatan keluarga atau kemampuan finansial.

PEMBAHASAN

Pengaruh partai politik sangat besar dalam meningkatkan jumlah caleg perempuan terpilih. Dari hasil pengamatan, partai politik peserta pemilu di Sulbar belum memiliki kader perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai untuk dapat diandalkan

sebagai kader guna menunjang struktur organisasi kelembagaan politik yang berkualitas. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa, partai politik belum yakin menggunakan kader perempuan untuk meningkatkan kualitas partai dalam meraih simpatisan yang cukup besar dari masyarakat atau pemilih. Pada akhirnya bagi kemenangan partai politik pada setiap pemilu masih mengandalkan laki-laki.

Dari pengamatan penelitian ini nampaknya ketidakseriusan partai dalam mengakomosi perempuan disebabkan karena perempuan selama ini hanya dijadikan sekedar simbol dalam legislatif dengan kata lain simbol bahwa perempuan ada. Hal ini sesuai dengan pengelompokan perwakilan oleh Pitkin. Menurut Pitkin perwakilan simbolik merupakan simbol perwakilan dari suatu kelompok atau bangsa (Marijan, 2012). Sama halnya dengan caleg perempuan yang sekedar dijadikan simbol keterwakilan perempuan. Sehingga timbul anggapan bahwa ada atau tidak adanya perempuan di legislatif akan sama saja. Perempuan dianggap belum memiliki peran yang besar.

Rendahnya keterpilihan perempuan juga di sebabkan faktor budaya yang berkembang di masyarakat Sulbar. Sejak jaman dulu Sulbar yang didominasi oleh budaya Mandar, mengenal budaya Siwaliparri. Siwaliparri merupakan salah satu nilai-nilai kearifan masyarakat lokal yang berarti saling tolong-menolong. Siwaliparri berangkat dari konsep rumah tangga masyarakat mandar, yakni pemahaman bahwa perempuan mandar selain sangat setia juga pandai dalam menempatkan diri sebagai perempuan dan sebagai istri. Konsep siwaliparri adalah berbagi peran antara suami dan istri, sebagai contoh jika suami adalah nelayan dan pergi untuk mencari ikan, maka tugas istri adalah mengurus anak dan menjual hasil tangkapan suami. Contoh lain, saat suami pergi bekerja maka tugas istri adalah menyiapkan makan dan mengurus rumah. Kesetaraan di level distribusi dalam konsep siwaliparri masih sangat kecil, karena sebagian besar kerja domestik masih dibebankan pada perempuan.

Penulis yang lahir dan tumbuh besar dalam masyarakat Mandar tulen begitu kental dengan nilai kearifan lokal yaitu *Malaqbi*, yang identik dengan perempuan yang sopan, rendah hati dan mampu menjaga sikap. Bagi masyarakat Mandar, anak perempuan harus memahami apa arti kesopanan, namun siapa yang berhak menetapkan standar arti kesopanan ini pun juga masih rancu. Hal semacam ini mempengaruhi pergaulan dan lingkungan pertemanan perempuan, sehingga saat mereka dewasa kemampuan untuk bersosialisasi tidak sehebat laki-laki.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “*Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan*”. Perempuan dan laki-laki

harusnya mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Dalam upaya memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen, didukung pula dengan adanya *affirmative action* yang telah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak Pemilu 2004. Melalui Undang-undang Partai Politik No. 31 tahun 2002 yang mengatur keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30 persen. Kesempatan dalam akses politik guna mewujudkan persamaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kuasa pengambilan keputusan sehingga kepentingan perempuan dapat di perjuangkan.

Kesempatan dalam akses politik bagi perempuan mulai terbuka di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sulbar. Keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif Sulbar tahun 2014 adalah sebanyak 7 orang, namun menjelang pelantikan 1 orang mengundurkan diri. Tujuh orang caleg perempuan yang terpilih hanya berasal dari 4 partai yaitu, Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 3 orang, partai Demokrat 2 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 1 orang, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 1 orang. Keempat partai politik tersebut adalah partai yang masuk dalam daftar 5 besar peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif Sulbar tahun 2014. Hal itu menunjukkan bahwa peran partai mendukung bagi keterpilihan perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Sulbar dipengaruhi oleh aspek budaya, agama, dan pengaruh keluarga caleg. Upaya meningkatkan dukungan konstituen dilakukan dengan sosialisasi, mengusung isu perempuan, dan membina hubungan dengan masyarakat. Keterwakilan perempuan dapat meningkat jika perempuan diberi ruang yang lebih luas dalam partai politik. Kaderisasi dan pendidikan politik bagi perempuan harus dijalankan oleh parpol. Selain itu dibutuhkan kesadaran dari perempuan sendiri untuk memiliki keinginan mengembangkan diri dengan menempuh pendidikan dan pikiran terbuka untuk terlibat langsung diruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R. (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta : Kencana Media.
- Azhar A. (2016). Menuju Pemilu Yang Berkualitas. *Jurnal Asia*.
- Karim R. 1991. *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta : Cetakan I.
- Marijan K. (2012). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Prenada Kencana Media.
- Pateman C. (2011). *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*. Jakarta : Demokrasi Elektoral.
- Philips A. (1998). *The Politics of Presence*. Oxford.
- Ramadhan M. (2014). *Representasi Anggota Dewan Indonesia*. Yogyakarta : cetakan I.

- Ratnawati. (2004). Poteret Kuota Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7.
- Sejarah Provinsi Sulawesi Barat. (2004). Diakses 9 Juli 2016. *Available from* : <http://sulbarprov.go.id/utama/profil/16>
- Surbakti R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- United Nation Development Programme Indonesia Journal. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.

**Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Perempuan Terpilih Pada
Pemilu Legislatif 2014 di Sulbar**

Nomor	Nama	Dapil	Partai	No.Urut	Suara
1	Hj. A. Marini Ariakati	2	GOLKAR	3	3.939
2	Dra. Hj. Jumiati A. Mahmud	3	GERINDRA	1	2.287
3	Hj. Nurul Fuada A. Ma	4	GOLKAR	4	5.938
4	Hj. Syahariah	4	DEMOKRAT	1	10.184
5	Hj. Fatmawati L. S.Sos	5	DEMOKRAT	3	7.194
6	Hastuti Indriani, SE	6	GOLKAR	2	3.750

Sumber. KPU Sulbar 2016

¹ *Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat*

(email : citranayy@gmail.com)

² *Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat*

(email : citranayy@gmail.com)